BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Efektivitas Program Pengelolaan Sampah Wilayah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang dalam mengelola sampah rumah tangga di Kecamatan Semarang Barat dinilai belum berjalan secara optimal serta masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara sektor hulu dan hilir. Di satu sisi, program telah mencapai efektivitas yang tinggi pada dimensi kognitif dan rutinitas di sektor hulu, yang ditunjukkan oleh tingginya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan bank sampah (skor 4,32), efektivitas sosialisasi pemilahan sampah (skor 4,17), serta keteraturan petugas dalam melakukan pengangkutan sampah dari rumah warga (skor 4,00). Namun, di sisi lain, efektivitas program mengalami penurunan pada dimensi prasarana dan operasional di sektor hilir akibat keterbatasan ketersediaan lahan (*land scarcity*) yang memunculkan ketimpangan spasial (*spatial injustice*) dalam penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) (skor terendah 3,41). Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh pengurangan anggaran operasional sebesar 30% yang menghambat implementasi kebijakan melalui berkurangnya kuota bahan bakar minyak (BBM) dan ritase armada pengangkut. Selain itu, masih ditemukannya praktik pencampuran kembali (re-mixing) sampah yang telah dipilah oleh petugas di sektor hilir mengurangi konsistensi pelaksanaan program, berpotensi menurunkan kepercayaan

masyarakat terhadap sistem pengelolaan sampah, serta belum sepenuhnya mendukung pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat..

2. Sinergi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Semarang Barat masih berjalan secara asimetris, terfragmentasi, dan cenderung bercorak *top-down* akibat dominasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai aktor utama dalam pelaksanaan program. Hambatan dalam tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) ditandai oleh belum optimalnya ruang deliberatif karena tidak tersedianya forum komunikasi rutin di tingkat kecamatan, belum terwujudnya pembagian kewenangan yang setara (*shared power*), serta adanya disparitas kapasitas kelembagaan antarkelurahan. Kelurahan Gisikdrono berhasil mengembangkan model kolaborasi yang adaptif dan responsif melalui kepemimpinan kewirausahaan (*entrepreneurial leadership*) di tingkat lokal yang mampu mengoptimalkan kemitraan dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Pertamina. Kolaborasi tersebut diperkuat oleh inovasi birokrasi "ASN Wajib Nyampah" yang berhasil mendorong sekitar 95% partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kompos dan budidaya maggot. Sebaliknya, kolaborasi di Kelurahan Kalibanteng Kulon belum berkembang secara optimal akibat terbatasnya inisiatif kelembagaan dalam membangun kemitraan dengan sektor swasta di kawasan sekitar Bandara Ahmad Yani. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pengelolaan bank sampah karena keterbatasan dukungan sarana dan prasarana, serta diperkuat oleh perbedaan pemahaman terhadap

implementasi regulasi mengenai sanksi denda dan belum tersedianya instrumen penegakan hukum yang efektif di tingkat operasional.

3. Peran kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang dinilai belum cukup kuat dan komprehensif dalam memfasilitasi keberlanjutan program di tingkat tapak. Lemahnya kapasitas institusional akibat pemotongan anggaran berimplikasi pada ketiadaan infrastruktur pengangkutan hilir yang tersegregasi. Ketidaksiapan fasilitatif ini pada akhirnya mencederai partisipasi masyarakat dan memicu munculnya fenomena *remixing* di lapangan.

4.2 Saran

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang disarankan untuk segera melakukan restrukturisasi radikal terhadap manajemen logistik hilir dan sistem komunikasi publik guna memulihkan kepercayaan (*trust*) serta mengunci konsistensi partisipasi aktif masyarakat di klaster permukiman domestik. Langkah taktis yang harus diprioritaskan adalah menghentikan total praktik pencampuran kembali (*re-mixing*) sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan cara melakukan pengadaan armada truk angkutan bersekat (*compartment trucks*) atau memberlakukan diferensiasi jadwal pengangkutan harian yang ketat antara residu organik dan anorganik.
2. Kecamatan Semarang Barat, bersama seluruh elemen non-pemerintah disarankan untuk melembagakan sebuah Forum Tata Kelola Kolaboratif (*collaborative governance forum*) yang permanen, inklusif, dan memiliki

regulasi yang mengikat. Sinergi horizontal harus ditransformasikan dari bentuk koordinasi informal-sporadis menjadi kemitraan struktural yang mampu memberikan jaminan pasar (*market assurance*) dan kepastian rantai pasok ekonomi sirkular bagi 6 bank sampah aktif yang ada di tingkat tapak.

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga dengan menggunakan pendekatan komparatif antarkecamatan atau antardaerah sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam konteks sosial, kelembagaan, dan kapasitas fiskal yang berbeda. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mixed methods*) untuk menganalisis hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan efektivitas tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) secara lebih komprehensif sehingga menghasilkan temuan empiris yang lebih kuat sebagai dasar penyusunan kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.